DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Abdul Halim. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Keempat. Bandung. Alfabeta.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam buku 2 pedoman penerapan penganggaran berbasis kinerja (2009 : 20).
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Jakarta. Erlangga.
- Bastian, Indra. 2010, Akuntansi Sektor Publik, Edisi keempat. Jakarta. Erlangga.
- Dadang Solihin. 2008. Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja.
- DEPUTI IV BPKP. (2005). Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi). Jakarta: BPKP.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 (Inpres 7/1999) tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Jonathan Sarwono. 2005. Teori dan Praktik Riset Pemasaran dengan SPSS. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: BFPE Yogyakarta.
- Nazir, Mohamad. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noordiawan, Dedi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Deputi IV BPKP).
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Pusdiklatwas BPKP.2007. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Edisi 5. Jakarta.

Rudianto. 2009. Penganggaran. Jakarta. Erlangga.

Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suharyadi dan Perwanto. 2009. Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

http://budhi.my.or.id/news/?p=545 yang di unduh padaTanggal 10 Oktober 2013

